

PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TERHADAP
USAHA HIBURAN (RESTORAN) DI KOTA SURABAYA
(Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Vetera” Jawa Timur



Oleh :

RIGKY NODANG R
NPM 0771010083

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TERHADAP
USAHA HIBURAN (RESTORAN)
DI KOTA SURABAYA
(Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)

Disusun oleh :

RIGKY NODANG R
NPM. 0771010083

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Mengetahui,

DEKAN

Menyetujui,

PEMBIMBING

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

Haryo Sulistiyantoro.SH.MM
NIP.196206251991031001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA HIBURAN (Restoran)
DI KOTA SURABAYA

(Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)

Oleh:

RIGKY NODANG R

NPM. 0871010118

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur
Pada Tanggal 7 Juni 2012

Menyetujui,

Pembimbing

Tim Penguji

1.

Haryo Sulistyantoro,SH.MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001

H. Sutrisno,SH.,M.Hum
NIP/NPT 19601212 198803 1 001
2.

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001
3.

Subani.SH.,M.Si
NIP/NPT 19510504 198303 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Haryo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA HIBURAN (Restoran)
DI KOTA SURABAYA

(Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)

Oleh:

RIGKY NODANG R

NPM 0771010083

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur

Pada tanggal 7 Juni 2012

Menyetujui,

Pembimbing

Tim Penguji

1.

Haryo Sulistiyantoro,SH.MM

NIP/NPT 19510504 198303 1 001

H. Sutrisno,SH.,M.Hum

NIP/NPT 19601212 198803 1 001

2.

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM

NIP/NPT 19620625 199103 1 001

3.

Subani.SH.,M.Si

NIP/NPT 19510504 198303 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Haryo Sulistiyantoro,SH.,MM

NIP/NPT 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rigky Nodang R
Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 11 Juni 1988
NPM : 07701010083
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Alamat : Petemon III no 104

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
“Pemberian Izin Gangguan Terhadap Usaha Hiburan (Restoran) Di Kota Surabaya
(Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)” dalam rangka
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar
hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat),
maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan
(Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya
dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
PEMBIMBING

Surabaya, Juni 2012
PENULIS

Haryo Sulistiyantoro, SH. MM
NIP. 19620625 199103 1001

Rigky Nodang R.
NPM. 0771010083

PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR SKRIPSI
PENELITIAN

Judul Penelitian : PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TERHADAP
USAHA HIBUR (RESTORAN) DI KOTA
SURABAYA (BERDASARKAN PERDA NO.1
TAHUN 2004 TENTANG IZIN GANGGUAN)

Nama Mahasiswa : Rigky Nodang R

NPM : 0771010083

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Telah disetujui untuk mengikuti Seminar Proposal

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

HARYO SULISTYANTORO, SH.,MM.
NIP.19620625199031001

P.HANDOKO.S.SOS.,SH.,MM.
NIP196609261992031001

Mengetahui
A.n. Ketua Program Studi
SESPROGDI

FAUZUL ALIWARMAN, SH.,M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini Penulis mengambil judul “Pemberian Izin Gangguan Terhadap Usaha Hiburan (Restoran) di Kota Surabaya (Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)”

Penulisan skripsi ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Strata I progdi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna menyusun skripsi.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak, maka kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.yang juga sebagai dosen pembimbing skripsi
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
3. Seluruh Staf, dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dalam pelaksanaan dan kelancaran pengerjaan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu selaku staff bagian hukum Pemerintahan Kota Surabaya yang bersedia mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Untuk Bapak,Ibu dan Saudari-saudariku tercinta yang telah memberikan dorongan serta perhatian untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2007 dan teman-teman organisasi dikampus serta semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan masukan dalam pembuatan skripsi hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, Juni 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Rigky Nodang R
NPM : 0771010083
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 11 Juni 1988
Program Studi : HTN
Judul Skripsi :

PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA HIBURAN (RESTORAN)
DI KOTA SURABAYA (Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)
Abstraksi

Rentannya bisnis di bidang restoran akan menimbulkan berbagai gangguan, maka diperlukan Izin Gangguan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang mungkin akan terjadi. Seperti halnya suatu kegiatan usaha pasti sedikitnya dapat menyebabkan terganggunya suatu kehidupan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usaha tersebut. Untuk itu penulis mengambil dua macam permasalahan yang dituangkan dalam skripsi ini yakni mengenai bagaimanakah mekanisme pemberian Izin Gangguan dan perpanjangan Izin Gangguan terhadap restoran di Kota Surabaya serta sanksi bagi yang tidak memenuhi perizinan ini. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier yang disusun secara sistematis yakni berurutan dari bab I, bab II, bab III dan bab IV. Setelah dilakukan pengujian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: pemilik restoran dalam pendirian restoran wajib untuk mengurus Izin Gangguan karena restoran merupakan salah satu obyek dari Izin Gangguan yang ditengarai dapat menimbulkan dampak gangguan terhadap lingkungan sekitar. Hal yang membedakan tentang tata cara perpanjangan Izin Gangguan restoran dengan obyek Izin Gangguan lain yakni mengenai kewajiban melampirkan Surat Setoran Pajak Restoran bulan terakhir. Sanksi bagi yang tidak mengajukan permohonan Izin Gangguan ataupun tidak memperpanjang izin gangguannya dibagi menjadi dua macam, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa bunga 2 % dari besarnya retribusi yang terutang, penutupan tempat usaha, pencabutan izin, dan adanya keharusan membayar uang paksa. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa kurungan dan denda.

Kata Kunci : Usaha Hiburan. Izin gangguan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR REVISI SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Pengertian Peraturan Daerah.....	8
G. Pengertian dan Sejarah Izin Gangguan	11
H. Pengertian Subyek dan Obyek Izin Gangguan.....	14
I. Ketentuan Sanksi Dalam Izin Gangguan	24
J. Metode Penelitian	25
K. Sumber Data	26
L. Sistematika Penulisan	28

BAB II	Mekanisme Peraturan Undang-undang Yang Mengatur Tentang Izin Gangguan Dan Perpanjangan Izin Gangguan (restoran) Dikota Surabaya	30
BAB III	Akibat hukum izin gangguan apabila pengusaha tidak mengurus atau memperpanjang izin gangguan (restoran) dikota Surabaya...	47
BAB IV	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN	52
	B. SARAN	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis moneter dipertengahan tahun 1997 mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara Indonesia. Akibat dari keterpurukan ekonomi tersebut maka berakibat pula pada kehidupan sosial di masyarakat. Banyaknya pengangguran, hancurnya berbagai bisnis yang telah dirintis sejak lama dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Tidak percayanya masyarakat pada pemerintah era itu membuat kesulitan yang sangat besar dikalangan pengusaha yang sebagian besar usahanya mengalami kebangkrutan sehingga kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang signifikan.

Akan tetapi dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian di negara kita akhir-akhir ini dan semakin kreatifitasnya para pelaku usaha untuk mencari hal-hal baru sebagai lahan bisnisnya maka berdampak pula dengan semakin maraknya bisnis-bisnis disegala bidang usaha. Salah satu di kota Surabaya yang berkembang pesat akan semakin menarik banyak investasi atau mendirikan usaha di kota Surabaya seiring dengan bertambahnya kegiatan usaha tersebut juga selain dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor, pajak dan retribusi. Untuk itu bisnis yang sangat megirukan dan prospek yang bagus adalah bisnis di bidang kepariwisataan seperti halnya bisnis rumah makan atau restoran.

Tidak ada orang yang tidak butuh makan. Mungkin idiom inilah yang menggambarkan bahwa bisnis di bidang rumah makan atau restoran merupakan salah satu bisnis yang dilirik oleh para pelaku usaha karena cerahnya prospek bisnis di restoran.

Tetapi seiring dengan banyaknya bisnis di bidang restoran maka diikuti pula dengan masalah baru yang timbul, khususnya bagi jenis usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Dalam menjalankan bisnis restoran seringkali para pelaku usaha mengabaikan mengenai baku mutu air, dan baku mutu tingkat gangguan. Padahal dalam ketentuan pasal 14 (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebutkan bahwa “Untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup”.¹

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air Pasal 1 ayat (4), maka yang dimaksud dengan baku mutu air adalah : “Batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar

¹John Salindeho, Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 12.

yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu harus sesuai dengan peruntukannya”.²

Baku mutu air ditetapkan berdasarkan kegunaan air bagi kepentingan kesehatan, rumah tangga, perikanan atau peternakan, pertanian dan perindustrian³

Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 10 ayat (3) maka yang dimaksud dengan baku mutu tingkat gangguan adalah : “Batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan atau zat padat.”⁴

Dalam keputusan peraturanh pemerintah No. 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas tingkat kebisingan dan indeks standar pencemar udara. Baku mutu udara ambien nasional ditetapkan sebagai batas maksimum mutu udara ambien untuk mencegah terjadinya udara dan baku mutu udara ambien nasional ini dapat ditinjau kembali setelah lima tahun.⁵

Dalam mengatasi masalah atau kendala seperti diatas kiranya diperlu dimiliki terlebih dahulu tiga kata kunci yaitu persepsi kesadaran dan ketaatan. persepsi yang dimaksud adalah cara pandang kita terhadap penegakan hukum lingkungan yang merupakan tanggung jawab kita bersama dan untuk

²Ibid., hal. 14.

³ Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung 2011, hal. 72

⁴ John Salindeho, Op.cit. hal. 16.

⁵ Muhamad Erwin, Op.cit. hal. 74.

itu, dari sini diharapkan lahirnya kesadaran kita bersama untuk sungguh-sungguh menegakan hukum lingkungan.

Rentannya bisnis di bidang restoran akan menimbulkan berbagai gangguan, maka diperlukan Izin Gangguan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk seperti telah dijelaskan diatas. Izin Gangguan sebenarnya merupakan suatu pengarah mengenai bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup dan ekosistem dimana manusia berada di dalamnya.

Banyak peraturan yang mengatur mengenai Izin Gangguan yang ada di Indonesia ini. Undang-undang yang mengatur masalah ini adalah Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 Jo. Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang Izin Gangguan. Akan tetapi khusus untuk Kota Surabaya dipergunakan peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai Izin Gangguan yaitu Peraturan Daerah (Selanjutnya disebut Perda) No. 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan. Sebelum berlakunya Perda No. 1 Tahun 2004, mengenai Izin Gangguan dipergunakan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penyelesaian, Pengalihan dan Pendaftaran Izin Gangguan. Akan tetapi walaupun sudah muncul Perda No. 1 Tahun 2004 bukan berarti peraturan-peraturan lama tidak dipergunakan lagi, hal tersebut berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal II Aturan Peralihan yang menyebutkan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan peraturan yang baru

menurut Undang-undang ini.” Jadi intinya adalah semua peraturan yang lama asal substansi yang terkandung didalamnya tidak diatur dalam undang-undang yang baru, maka aturan tersebut masih bisa dipergunakan.

Dalam hal ini, Izin Gangguan begitu diperlukan bagi tiap tempat usaha dikarenakan adanya hal-hal yang membatasi dalam banyak sisi tempat usaha tersebut, khususnya mengenai hal dampak lingkungan. Dampak penting dari suatu usaha tidak selama positif, sering juga negatif. Seperti halnya suatu kegiatan usaha pasti sedikitnya dapat menyebabkan terganggunya suatu kehidupan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usaha tersebut. Ketentuan memberikan izin gangguan hendaknya harus mempertimbangkan kepentingan pengusaha kecil dan mikro yaitu dengan menambahkan penggolongan atau penetapan kriteria industri rumah tangga sebagai objek izin gangguan. Namun pemerintah kota Surabaya tetap perlu memperhatikan keseimbangan dimana iklim berusaha tetap kondusif, sementara setiap individu yang lain tetap terjaga dari gangguan yang disebabkan oleh adanya usaha tersebut.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Pemberian Izin Gangguan Terhadap Usaha Hiburan (Restoran) di Kota Surabaya (Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)” akan dibatasi pada permasalahan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme Permohonan Izin Gangguan dan perpanjangan Izin Gangguan (restoran) di kota Surabaya ditinjau dari Perda no 1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan ?
2. Apa akibat hukum Izin Gangguan apabila pengusaha tidak mengurus atau memperpanjang Izin Gangguan (restoran) di kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme atau cara mengajukan Izin Gangguan untuk restoran di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui sanksi-sanksi yang timbul dikarenakan kelalaian pengusaha atau badan hukum yang tidak mengajukan atau memperpanjang Izin Gangguan bagi restoran tempat usahanya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi dibidang hukum perizinan terutama dalam masalah Izin Gangguan dimana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai prosedur Izin Gangguan dan sanksi yang dijatuhkan apabila tidak mengajukan atau memperpanjang Izin Gangguan tersebut. Diharapkan pula penelitian ini dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi civitas akademika

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, serta bagi masyarakat yang khususnya berkecimpung di dunia bisnis restoran.

Manfaat secara umum yaitu sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Asal kata restoran adalah berasal dari bahasa Inggris yakni “Restaurant” yang artinya tempat dimana orang beristirahat sejenak.⁶ Seiring dengan perkembangan jaman maka istilah restoran kemudian disadur menjadi bahasa Indonesia dengan kata “Restoran”.

Pengertian restoran berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran adalah: “Tempat menyantap makanan dan atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk penyediaan penjualan makanan atau minuman yang diantar atau dibawa pulang”.

Pengertian restoran menurut Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata adalah :

Suatu jenis jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya, tidak termasuk restoran yang berada di hotel, jasa boga.

⁶William D. Powell, Linguistik For Computer Ver. 1.0, PT. Atlantism Programma Prima, 1997.

Pengertian lain mengenai restoran adalah setiap usaha di bidang penjualan barang dan jasa yang ruang lingkup kegiatannya berupa penyediaan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.⁷

Sedangkan Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya disebut sebagai pengusaha restoran.

Bila dilihat dari pengertian restoran yang terdapat dalam Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran dan Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata maka sudah jelas bahwa restoran merupakan termasuk dalam lingkup kepariwisataan dan diperkuat pula dengan adanya Lampiran Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Obyek Izin Gangguan Pasal 3 huruf a dimana dalam hal ini restoran termasuk dalam obyek izin gangguan dalam bidang kepariwisataan.

F. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (untuk selanjutnya disebut Perda) adalah suatu keputusan yang di maksudkan untuk berlaku lama dan merupakan suatu pokok kaidah (norma) buat segala hal yang dapat dimasukkan dalam norma itu Dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berlaku (mengikat) umum (algemeen binderegels) baik yang memuat ancaman pidana maupun tidak.⁸

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 458.

⁸Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Cet I, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 21.

Di dalam UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah di dalam bab VI diatur mengenai Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah yang Isinya yakni :

Pasal 69

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 70

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 71

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah.
- (2) Keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 73

- (1) Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 74

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

1. Kemampuan aparatur suatu daerah disebut daerah otonom apabila sebagai

berikut ini:

- a. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah, urusan rumah tangga ini merupakan urusan yang ddi serahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.
- b. Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus atau diselenggarakan atas inisiatif dan kebijakan daerah.
- c. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur pemerintah pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan rumah tangga daerahnya sendiri.
- d. Mempunyai sumber keuandiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam urusan rumah tangga daerahnya.⁹

2. Pajak daerah.

Pajak daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah pengertian pajak secara umum adalah

⁹ Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 11

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat mencegah atau mendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

3. Retribusi daerah

Pengertian dari retribusi daerah adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

G. Pengertian dan Sejarah Izin Gangguan

Izin merupakan pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) dan atau persetujuan yang diperbolehkan.¹⁰ Tujuan izin adalah menghilangkan suatu larangan menjadi diperbolehkan. Izin juga merupakan alat instrumen pemerintah yang bertujuan untuk pengendalian terhadap perilaku masyarakat dan merupakan salah satu instrumen yuridis yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi.

Sedangkan Izin Gangguan berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2004 Pasal 9 berbunyi: "Izin Gangguan adalah Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah."

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit., hal. 723.

Adanya pemberlakuan Izin Gangguan dimulai di Eropa pada tahun 1836 yaitu dengan adanya Resolusi 1836 yang isinya tentang keharusan adanya izin gangguan bagi tempat-tempat yang ditengarai dapat menimbulkan bahaya, kebakaran, dan bahaya lainnya. Latar belakang yang mengakibatkan dibentuknya undang-undang ini adalah terjadinya modernisasi disegala bidang dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Pabrik-pabrik seakan menjamur dimana-mana, kaum bangsawan berlomba-lomba untuk mendirikan pabrik-pabrik. Akan tetapi seiring dengan semakin banyaknya pabrik-pabrik yang didirikan, maka secara otomatis mempengaruhi berbagai kondisi disekitar lingkungan pabrik tersebut. Saat itu banyak para pengusaha yang tidak mengindahkan tentang bahaya yang mengancam di lingkungan sekitar tempat pabrik mereka berdiri. Bahaya seperti kebakaran, gangguan kesehatan lingkungan semakin dirasakan oleh masyarakat sekitar pabrik.¹¹

Sedangkan di Indonesia sendiri Undang-undang Gangguan dibuat dengan menggunakan Asas Konkordansi dari negeri Belanda. Asas konkordansi adalah asas keselarasan atau asas berlakunya sistem hukum Indonesia yang diselaraskan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Asas konkordansi diatur dalam I.S. pasal 131 ayat 2 yang berbunyi: “Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut undang-undang di negeri Belanda”. Hal ini berarti, bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang

¹¹John Salindeho, Op.Cit., Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 23.

Belanda di Indonesia harus dipersamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda.¹²

Undang-undang yang mengatur tentang Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) adalah Undang-undang Gangguan Stbl. 1926-226 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926 dan mengalami beberapa perubahan dan penambahan yakni dengan Stbl 1927-No. 499 kemudian diubah lagi dengan stbl. 1932 – No. 80 dan No. 341, hingga paling akhir dengan Stbl. 1940-No. 14 dan No. 450 yang dikeluarkan pada tahun 1941. Sedangkan dalam Surat Edaran Gouvernement Secretaris tanggal 18 April 1928 No. 792/II (Bb. 11629) diperingatkan cara-cara melaksanakan beberapa ketentuan dari Undang-undang Gangguan ini.¹³

Kesimpulan dari isi Undang-undang Gangguan tersebut adalah : bahwa seyogyanya publik janganlah dipersulit dengan adanya hasrat untuk mendirikan bangunan-bangunan kecil tempat bekerja dan perusahaan-perusahaan kecil untuk memasang kincir-kincir dengan kekuatan listrik yang disambung dari penerangan aliran listrik karena dapat menimbulkan gangguan sehingga diperlukan adanya izin gangguan atasnya.

Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan pada Bab XX dimana isinya berbunyi: “Warung-warung dalam bangunan yang tetap; demikian pula

¹² Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 178.

¹³ John Salindeho, Op.Cit., hal 43

segala pendirian-pendirian yang lain yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan maka harus ada izin atasnya”.

Mengambil dari bunyi undang-undang di atas maka dalam hal ini restoran dapat dikategorikan sebagai warung dalam bangunan tetap, sehingga untuk restoran diperlukan adanya izin gangguan.

H. Pengertian Subyek dan Obyek Izin Gangguan

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai subyek dan obyek dari Izin Gangguan maka terlebih dahulu penulis menerangkan secara rinci mengenai subyek hukum dan obyek hukum pada umumnya.

1. Pengertian Subyek hukum

Subyek hukum menurut macamnya terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*), dan badan hukum (*recht person*). Pengertian dari subyek hukum itu sendiri adalah personal yang mempunyai hak dan kewajiban¹⁴ Dapat juga dikatakan, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, menurut Achmad Ichsan :

Manusia adalah pengertian biologis ialah gejala dalam alam, gejala biologika, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya. Sedangkan “orang” adalah pengertian yuridis ialah gejala dalam hidup bermasyarakat. Dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau *persoon*¹⁵

¹⁴ E.Utrecht.op.cit.hal 234.

¹⁵ Achmad Ichsan, Hukum Perdata IA, Pembimbing Masa, Jakarta, Cet. 1996, hal 68.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini, manusia dianggap atau diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau *persoon*. Karena itu setiap manusia diakui sebagai subyek hukum (*recht persoon lijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban.

Pada dasarnya seseorang dinyatakan sebagai subyek hukum ketika dilahirkan, dan berakhir ketika meninggal dunia. Namun hal ini tidak mutlak, sebab ada perkecualian seperti yang diatur dan ditetapkan dalam pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

Anak-anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada.

Sebagai pendukung hak dan kewajiban, seseorang memiliki kewenangan untuk bertindak, dan tentu kewenangan bertindak tersebut harus menurut hukum, dengan kata lain manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Namun demikian kewenangan itu dibatasi oleh beberapa faktor dan keadaan tertentu, sehingga seseorang dapat dinyatakan wenang untuk melakukan tindakan hukum apabila dia itu dewasa dan sehat jiwanya serta tidak berada dalam pengampuan (*curandus*).¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa manusia baik warga negara maupun orang asing tidak memandang agama, kebudayaan, suku maupun

¹⁶Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung, P.T Refika Aditama, 2001, hal.33.

kedudukan dan jabatan semua adalah subyek hukum, sebagai pembawa hak, manusia memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum, sesuai dengan pengertian dari hak dan kewajiban itu sendiri, yaitu: hak adalah kekuatan atau kekuasaan daripada persona untuk boleh melakukan sesuatu atau boleh tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah suatu peran daripada persona untuk harus melakukan sesuatu atau harus tidak melakukan sesuatu.

Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum pun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking* atau *rechtsverhouding*), baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, maupun antara badan hukum dengan orang (*natuurlijkpersoon*).¹⁷

Di dalam pergaulan hukum ada dua macam badan hukum sebagai berikut :

a. Badan Hukum Publik

Seperti negara, daerah-daerah, dan lain sebagainya.

b. Badan Hukum Perdata

Bentuk serta susunan diatur oleh hukum privat dan menurut tujuan yang dikejar dapat dibeda-bedakan dalam :

- 1) Perserikatan dengan tujuan tidak materil (perkumpulan gereja)
- 2) Perserikatan dengan tujuan memperoleh laba (perseroan terbatas)

¹⁷ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti , Bandung, 1999, hal 118.

- 3) Perserikatan yang dengan tujuan memenuhi kebutuhan materil para anggotanya (koperasi).¹⁸

Disamping penggolongan seperti di atas dapat pula dibagi-bagi badan hukum itu dalam dua jenis, yaitu:

- a. Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri (personifikasi).
Badan hukum yang beranggota, tetapi memiliki hak atau kewajiban sendiri. Contoh : PT. Dati-Dati, Koperasi, dan sebagainya.
- b. Yayasan ialah tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu.
Yayasan sebagai pendukung hak dan kewajiban sendiri. Contoh : Yayasan Lektur di Jakarta, wakaf ialah yayasan dalam bentuk hukum islam.
Perbedaan antara yayasan dengan korporasi ialah bahwa yayasan tidak mempunyai anggota, tetapi juga mempunyai pengurus yang menyelenggarakan kekayaan dan tujuannya.¹⁹

Akan tetapi jika badan hukum tersebut melakukan pelanggaran maka pengenaan hukuman pidana hanya dapat dikenakan terhadap oknum atau perseorangan yang melakukan dan berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum contohnya seorang direktur. Namun suatu perkumpulan sebagai badan hukum tersendiri juga dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukuman pidana ini tentunya hanya yang berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan. Contoh perbuatan tersebut adalah gagasan yang merata dari putusan dewan

¹⁸ Soerjono Wignjidipero, Op.Cit., hal 41.

¹⁹ Ibid.

direksi . Seperti halnya yang dinyatakan dalam pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak di pidana.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan subyek hukum Izin Gangguan menurut Pasal 3 Perda No. 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan adalah: “Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, wajib memiliki Izin Gangguan”.

Jadi dalam pasal ini orang atau badan hukum harus mempunyai Izin Gangguan apabila orang atau badan hukum tersebut mendirikan dan/atau memperluas tempat usahanya dimana di lokasi tersebut rentan akan timbulnya suatu bahaya atau gangguan terhadap lingkungan sekitar.

2. Tujuan dan pengertian hukum

Sebenarnya hukum adalah alat, bukan tujuan .yang mempunyai tujuan adalah manusia.akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.

Teori etis merupakan pendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan.maksud dari keadilan disini adalah memberikan kepada orang lain apa yang menjadi bagian dari haknya

3. Hubungan hukum

Yang dimaksud hubungan hukum adalah suatu hubungan diantara para subyek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam setiap hubungan hukum selalu dapat hak dan kewajiban. Menurut macamnya hubungan hukum itu ada dua:

a. Hubungan hukum bersegi satu

Yang dimaksud hubungan hukum persegi satu adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan

b. Hubungan hukum persegi dua

Yang dimaksud hubungan hukum persegi dua adalah hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak

4. Hak dan kewajiban

Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban adalah wewenang yang diberikan hukum obyektif kepada subyek hukum .wewenang yang diberikan kepada subyek hukum contohnya wewenang untuk memiliki tanah dan bangunan yang penggunaanya diserahkan kepada pemilik itu sendiri.

Timbulnya sebab-sebab dari suatu hak:

a. Adanya subyek hukum yang baru,baik berupa orang maupun badan hukum

- b. Adanya perjanjian yang telah disepakati oleh pihak yang mengadakan perjanjian.
- c. Seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh hak itu
- d. Adanya kerugian yang diderita seseorang akibat kesalahan orang lain
- e. Kadaluarsa yang bersifat akuistif yaitu dapat melahirkan hak bagi seseorang.²⁰

5. Pengertian Obyek Hukum

Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subyek hukum. Dalam bahasa hukum, obyek hukum dapat juga di sebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan/ atau dimiliki subyek hukum. Misalnya, A meminjamkan buku kepada B. di sini yang menjadi obyek hukum dalam hubungan hukum antara A dan B adalah buku. Buku menjadi obyek hukum dari hak yang dimiliki A.²¹

Ada yang mengartikan hak sebagai izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Ada juga yang mengidentifikasikan hak dengan wewenang. Dalam bahasa latin, hak dan/ wewenang diberi istilah ius, sedangkan dalam bahasa Inggris diberi istilah right. Dalam bahasa Prancis digunakan istilah droit, sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah recht. Menyalahgunakan hak dalam bahasa Belanda di sebut misbruik van recht dan dalam bahasa Prancis di sebut abus de droit, sedangkan menyalahgunakan kekuasaan dalam bahasa Prancis disebut deousterment de pouvoir.²²

Untuk membedakan hak dan hukum, dalam bahasa Belanda digunakan istilah Subjectief recht untuk hak, dan objectief recht untuk

²⁰ Dudu Duswara, Op. Cit, hal. 53

²¹ ibid., hal. 55.

²² C.S.T. Kansil, Op.Cit.,hal. 37.

hukum atau peraturan-peraturan yang menimbulkan hak bagi seseorang. Sedangkan Apeldoorn mengartikan hak sebagai hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan. Hak timbul apabila hukum mulai bergerak.²³

Hak didalam izin adalah wewenang yang diberikan hukum obyektif kepada subyektif. wewenang yang diberikan kepada subyek hukum ini contohnya wewenang untuk memiliki tanah dan bangunan yang penggunaanya diserahkan kepada pemilik itu sendiri. kewenangan untuk itulah yang disebut hak .dengan kata lain dengan kata lain hak adalah tuntutan sah, agar orang lain bersikap tindak dengan cara-cara tertentu.

Sedangkan berdasarkan Pasal 2 Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan maka yang disebut sebagai obyek disini adalah semua tempat usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Obyek-obyek tersebut antara lain adalah:

1. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan dengan kategori gangguan ringan adalah sebagai berikut: usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3); usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK); usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat; bangunan tempat usaha tidak bertingkat.

²³Ibid., hal. 140.

2. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan dengan kategori gangguan berat berdasarkan (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450) adalah: Usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi; tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan; tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas; tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar ;tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah ; tempat pengeringan gandum/kecambah (mouterij), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan; tempat pembantaian, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit; pabrik porselin dan pecah belah (aaderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur; tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempatan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel; tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu; tempat persewaan kendaraan; tempat penembakan; gudang penggantungan tembakau; pabrik tapiok; pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau bahanbahan yang mengandung zat karet; gudang kapuk, perusahaan batik; warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan;

3. Tempat-tempat usaha lainnya yang wajib memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud, adalah:

a. Usaha di bidang pariwisata (kecuali usaha bidang pariwisata yang memperoleh izin usaha pariwisata bersyarat/khusus):

Usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam memancing, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan bilyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, theatre atau panggung terbuka dan tertutup, taman satwa, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health centre, pusat kesegaran jasmani atau fitness centre; restaurant, bar, depot dan cafe; tempat penginapan (hotel, penginapan remaja, losmen, motel, home stay dan guest house); tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya .

b. Usaha di bidang perindustrian dan perdagangan :

Ruang atau gedung atau tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan; perusahaan konveksi dengan menggunakan 5 (lima) mesin atau lebih; perusahaan percetakan; pengelolaan gedung-gedung perkantoran atau pertokoan; perusahaan studio rekaman; setasiun bahan bakar umum, penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas; tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia; tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, gas elpiji dan karbit; tempat penyepuhan, pencelupan, chroom, elektronik pating dan sejenisnya; bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo; tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya; pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi ruang pameran; toko elektronik yang menimbulkan kebisingan; tempat menyimpan atau mengolah atau mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan; tempat pembuatan makanan dan minuman;

c. Usaha di bidang kesehatan :

Apotek, toko obat; klinik spesialis atau rumah sakit bersalin atau rumah bersalin atau rumah sakit, laboratorium, balai pengobatan, industri farmasi, klinik kecantikan; peredaran produk makanan, minuman dan rokok.

d. Usaha di bidang perhubungan :

Atasiun radio dan televisi; tempat penyimpanan atau pool container; tempat penyimpanan atau garasi atau pool kendaraan angkutan barang maupun orang.

e. Usaha di bidang jasa :

Tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain); travel, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.

f. Usaha di bidang pertanian :

Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya. Jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan.²⁴

I. Ketentuan Sanksi Dalam Izin Gangguan

1. Sanksi Administrasi

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak dan atau kurang dibayar setiap bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Hal tersebut dicontohkan retribusi yang terutang adalah Rp. 1.000.000,- maka $2\% \times \text{Rp } 1.000.000,- = \text{Rp } 20.000,-$ akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah paling lama satu minggu setelah pembayaran retribusi.

²⁴ John Salindeho, Ob Cit, hal. 60

Bagi usaha yang tidak memiliki Izin Gangguan maka Kepala Daerah berwenang: melakukan penutupan atau penyegelan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha tersebut. Dan apabila ada tempat usaha yang telah dihentikan dan atau tempat usahanya tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar tarif retribusi yang harus ditetapkan atau dibayar, atas keterlambatan perhari untuk mematuhi ketentuan penghentian kegiatan usaha.

2. Sanksi Pidana

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ; misalnya retribusi yang terutang adalah Rp 10.000.000,- maka dia harus membayar denda sejumlah $4 \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp. } 40.000.000,-$. Apabila ia tidak bisa melaksanakan denda tersebut maka ia harus dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan.

J. Metode penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.

K. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dibagi adalah data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁵

Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- Undang-undang Dasar 1945.
- Staatsblaad 1847 Nomor 23 Tentang Pemberlakuan BW Nederland di Indonesia, selanjutnya disebut KUH Perdata. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 Jo. Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang Izin Gangguan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup
- Undang-undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan menteri dalam negeri no.27 tahun 2009 pedoman penetapan izin gangguan di daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

²⁵Soerjono Soekanto dan Srimamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. V, IND-HILL-CO, Jakarta, 2001, hal. 13.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan.
- Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata.
- Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian, Pengalihan dan Pendaftaran Izin Gangguan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur-literatur.²⁶ Adapun literatur-literatur tersebut yakni :

- Buku tentang masalah Izin Gangguan
- Buku tentang lingkungan hidup
- Buku tentang masalah Hukum Pidana
- Buku tentang masalah Hukum Perdata
- Buku tentang masalah Hukum Administrasi

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah: Kamus bahasa Indonesia

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku dan mempelajari literatur yang diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, artinya perumusan analisa dari hal yang umum yakni mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perizinan gangguan; menuju hal yang khusus yakni pendaftaran dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku ke Dinas Lingkungan Hidup.

L. Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dan rumusannya, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II : Mengenai pembahasan rumusan permasalahan pertama yaitu mekanisme rundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin gangguan dan perpanjangan izin gangguan (restoran) di kota

Surabaya ditinjau dari Perda no.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan.

BAB III : Mengenai pembahasan pokok permasalahan kedua yaitu akibat hukum izin gangguan apabila pengusaha tidak mengajukan memperpanjang izin gangguan.

BAB IV : Berisi kesimpulan dan saran, ini merupakan bab yang terakhir dari seluruh uraian dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini penulis membagi dalam dua bagian, bagian pertama adalah kesimpulan yang penulis ambil dari uraian-uraian bab-bab sebelumnya, dan bagian kedua adalah saran.